

**PENYELESAIAN UTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG PADA *JOINT OPERATION* JASA KONSTRUKSI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 161/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)**



**Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BIAULIA HUSNA ARNISA**

**NIM: 11000118120067**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN UTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN**  
**PEMBAYARAN UTANG PADA *JOINT OPERATION* JASA KONSTRUKSI**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 161/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

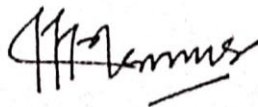
**BIAULIA HUSNA ARNISA**

**11000118120067**

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Siti Mahmudah, S.H., M.H.**  
**NIP. 196209211989022001**



**Dr. Sukirno, S.H., MS.i.**  
**NIP: 196409241990011001**

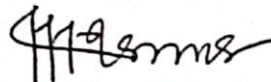
**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PENYELESAIAN UTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN**  
**PEMBAYARAN UTANG PADA *JOINT OPERATION* JASA KONSTRUKSI**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 161/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga..Jkt.Pst)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**BIAULIA HUSNA ARNISA**  
**NIM 11000118120067**

Telah diajukan didepan Dewan Penguji pada tanggal 27 April 2022

**Dewan Penguji**  
**Ketua**



**Siti Mahmudah, S.H., M.H.**  
**NIP. 196209211989022001**

Anggota Penguji I



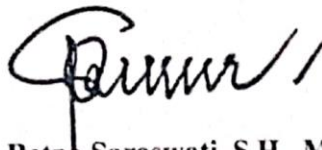
**Dr. Sukirno, S.H., MS.i.**  
**NIP: 196409241990011001**

Anggota Penguji II



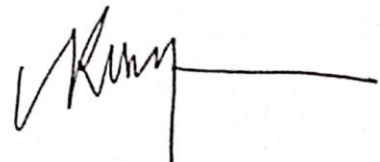
**Irawati, S.H. M.Hum**  
**NIP: 199001062018032001**

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196711191993032002**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H. M.H. M.Hum.**  
**NIP. 198407092008121002**

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 7 Maret 2022



Biaulia

Biaulia Husna Arnisa

11000118120067

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Dan Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan begian  
kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Talaq:4)

### **PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk Bapak dan Mama tersayang, Adik  
tersayang dan keluarga besar serta untuk almamater Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul Penyelesaian Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada *Joint Operation* Jasa Konstruksi (Studi Kasus Putusan Nomor 161/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan serta bantuan beberapa piha. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Muhyidin, S.Ag., M. Ag., M.H. selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasihat kepada Penulis selama menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang juga telah memberikan waktu, bimbingan, masukan, dan perhatian sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Dr. Sukirno, S.H., MS.i. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan waktu, bimbingan, masukan, dan perhatian sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dan berbagai nasihat selama Penulis menempuh

pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

9. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
10. Bapak Warsono selaku ayah penulis yang telah bekerja keras untuk mencukupi keperluan penulis dan Ibu Muslikah Sri Wahyuni selaku ibu penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan Tafrizal Hadan Arsena selaku adik penulis yang telah memberikan doa, semangat selama proses penulisan hukum.
11. Delegasi Universitas Diponegoro untuk NMCC A.G Pringgodigdo VII yaitu Akhlisa Elfany Zahra, Dinda Nur Annisa, Thesa Simarmata, Winda Gustianasari, Berlian Marcella, Atika Febri, Helen Serevina, Nauval Akbar, Prima Thomas, Nouval Eka.
12. Teman seperjuangan penulis selama proses pengerjaan penulisan hukum ini yaitu Silwa Nafiza, Arnita Febi, Natalia Nanda, Bob Nicholas, Ardhiansyah Fitrah.
13. Sahabat penulis selama masa sekolah hingga masa perkuliahan yaitu Erdanoe Apriyan Nasution, Raihasa Mahendra, Aldy Fakhryan, Rosita Dwiki Mustafa, Aprajnya Paramita, Salsabila Aprilia Hudoyo.
14. Teman-teman, abang-kakak, adik-adik serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua proses dan kesempatan yang dilalui bersama-sama.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah disebutkan diatas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala kebaikan kalian. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan, terutama bagi almamater Universitas Diponegoro.

Semarang, 7 Maret 2022

Penulis

## ABSTRAK

Penyelesaian utang piutang di Indonesia dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yaitu dengan cara kepailitan atau PKPU. PKPU juga dapat diajukan terhadap debitornya yang merupakan badan usaha bernama *joint operation* dimana didalam *joint operation* tersebut terdapat beberapa badan hukum. Pada bisnis jasa konstruksi, *joint operation* telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1991 melalui regulasi pemerintah yaitu Permen-PU No. 50/PRT/1991 yang kemudian terakhir dirubah menjadi Permen-PU No. 10/PRT/M/2014. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01. K. N/ 1999 tertanggal 23 Februari 1999 mengatur bahwa *joint operation* dapat dikategorikan sebagai perseroan Firma sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 KUHDagang. Masuknya *joint operation* dalam kategori firma, maka pengajuan PKPU terhadap *joint operation* mengacu pada Pasal 5 UU KPKPU, dimana mengatur mengenai permohonan harus memuat nama dan tempat tinggal setiap perseronya.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan Mengenai Pihak-Pihak Yang Dapat Dimohonkan PKPU Dalam *Joint Operation* di Indonesia dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 161/Pdt.Sus-PKPU/PN.Jkt.Pst. tentang pihak yang dapat dimohonkan PKPU pada *Joint Operation* Jasa Konstruksi. Kemudian, Proses penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini tepat digunakan karena memang pendekatan yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

**Kata Kunci:** *Joint Operation*, PKPU, Jasa Konstruksi



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	2
PENDAHULUAN .....	2
A.    Latar Belakang .....	2
B.    Rumusan Masalah .....	10
C.    Kerangka Pemikiran.....	11
D.    Tujuan Penelitian .....	11
E.    Manfaat Penelitian .....	12
F.    Metode Penelitian.....	12
G.    Sistematika Penulisan .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A.    Tinjauan Mengenai <i>Joint Operation</i> pada Jasa Konstruksi .....	17
1.    Tinjauan tentang <i>Joint Operation</i> .....	17
1.1. Pengertian dan Pengaturan <i>Joint Operation</i> .....	17
1.2. Jenis-Jenis <i>Joint Operation</i> .....	19
1.3. <i>Joint Operation</i> Pada Jasa Kosntruksi .....	19
1.4. Hubungan Antara Para Pihak.....	20
2.    Tinjauan Tentang Jasa Konstruksi.....	21
2.1. Pengertian Jasa Konstruksi dan Pengaturannya.....	21

2.2. Legalitas Usaha Jasa Konstruksi.....	23
2.3. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.....	24
2.4. Hubungan Para Pihak Berdasarkan Kontrak Kerja Konstruksi .....	26
2.5. Pengertian Sub Kontraktor.....	27
B. Tinjauan Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	29
1. Pengertian dan Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	29
2. Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan dan PKPU .....	31
3. Maksud dan Tujuan PKPU .....	32
4. Syarat-syarat Permohonan PKPU.....	32
5. Pihak -Pihak Dalam PKPU .....	34
6. Prosedur Pengajuan PKPU .....	38
7. Jenis-Jenis PKPU.....	41
8. Akibat Hukum Putusan PKPU .....	43
9. Berakhirnya PKPU .....	47
BAB III .....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Pengaturan Mengenai Pihak-Pihak Yang Dapat Dimohonkan PKPU Dalam <i>Joint Operation</i> di Indonesia.....	49
1. Bank sebagai Debitor PKPU .....	50
2. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Debitor PKPU .....	52
3. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagai Debitor PKPU.....	57
4. Persekutuan Perdata sebagai Debitor PKPU .....	65
5. Persekutuan Firma sebagai Debitor PKPU.....	67
6. Persekutuan Komanditer sebagai Debitor PKPU .....	70

7.	<i>Joint Operation</i> Jasa Konstruksi sebagai Debitor PKPU .....	72
B.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 161/Pdt.Sus-PKPU/PN.Jkt.Pst. tentang pihak yang dapat dimohonkan PKPU pada <i>Joint Operation</i> Jasa Konstruksi .....	76
1.	Kasus Posisi .....	76
1.1.	Uraian Fakta Hukum .....	76
1.2.	Pihak dan Hubungan Para Pihak .....	79
1.3.	Hubungan Pemohon dan Para Termohon .....	81
1.4.	Alasan Pemohon mengajukan PKPU .....	82
1.5.	Pertimbangan Hakim .....	87
2.	Analisa Kasus .....	90
BAB IV .....		95
PENUTUP .....		95
A.	Kesimpulan .....	95
B.	Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....		99